



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020 TELP (021)
3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361


Nomor : 6-64/Bua.3/KU.00/04/2020 24 April 2020
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Tanggapan atas Konsep
Temuan Pemeriksaan BPK Tahap II

Yth. 1. Sekretaris Satuan Kerja Daftar Terlampir
2. Unit Penanggung Jawab Daftar Terlampir

Sehubungan dengan diterimanya konsep temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 52/LK-MA/04/2020 tanggal 23 April 2020 hal Permintaan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan, dengan ini diminta kepada Unit Penanggungjawab untuk berkoordinasi dan menghimpun tanggapan dari Satuan Kerja sesuai rincian dalam konsep temuan pemeriksaan terlampir yang menjadi tanggungjawabnya dan menyerahkan tanggapan yang telah diverifikasi kepada Kepala Biro Keuangan melalui surat elektronik (email) biro-keuangan@mahkamahagung.go.id paling lambat Senin 27 April 2020 Pukul 10.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi MA RI


Sahwan, S.H., M.H.
NIP. 19680817 198903 1 007

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer Mahkamah Agung
6. Ketua Pengadilan sesuai Daftar Terlampir
7. Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan.

Lampiran Surat Kepala Biro Keuangan
 Nomor : B/ 64 /Bua.3/KU.00/04/2020
 Tanggal : 24 April 2020

DAFTAR SATUAN KERJA DAN UNIT PENANGGUNGJAWAB
 YANG HARUS MENYUSUN TANGGAPAN ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK
 TAHAP II

No.	SATUAN KERJA	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMVERIFIKASI TANGGAPAN DARI SATUAN KERJA
1	PA Cianjur, PA Curup, PN Pasaman Barat, PN Cibinong, PA Krui, PN Argamakmur, PN Liwa	Bagian Rencana Program Biro Perencanaan dan Organisasi BUA
2	133 Satker Penerima Manfaat PPO BTN	Bagian Rencana Program Biro Perencanaan dan Organisasi BUA
3	BUA, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag dan Ditjen Badilmiltun	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan BUA - Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA - Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilum - Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilag - Subdit Pembinaan Administrasi Diltun Ditjen Badilmiltun
4	BUA	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA - Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA
5	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
6	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
7	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
8	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
9	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
10	PTUN Jakarta	Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan BUA Auditor Badan Pengawasan
11	PN Jakarta Utara	Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan BUA Auditor Badan Pengawasan
12	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA
13	BUA	Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA

MATRIKS TEMUAN YANG DISERAHKAN DAN DIMINTAKAN TANGGAPAN

No.	Judul/Indikasi	Satker	Reff.
1	Penerimaan Hibah Pada Tujuh Satuan Kerja Tidak Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	PA Cianjur, PA Curup, PN Pasaman Barat, PN Cibinong, PA Krui, PN Argamakmur, PN Liwa	TP 1
2	Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Hasil Kerjasama PPO Dengan Bank BTN Belum Memadai	133 satker penerima PPO	TP 2
3	Penatausahaan dan Pengungkapan Rekening Pemerintah Lainnya serta Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung (MA) Belum Memadai	BUA, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun	TP 3
4	Penyajian Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya pada LK MA Belum Didukung Perhitungan yang Memadai	BUA	TP 4
5	Penatausahaan Pekerjaan Renovasi Lantai 8 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Tidak Sesuai Kontrak	BUA	TP 5
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Command Center, Assesment Center dan Ruang Lounge Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BUA	TP 6
7	Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan ACP Sisi Dalam Gedung Mahkamah Agung Tidak Sesuai Kontrak	BUA	TP 7
8	Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Blok A dan B Gedung Mahkamah Agung RI Tidak Sesuai Kontrak	BUA	TP 8
9	Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Ruang Lounge Mahkamah Agung RI Tidak Sesuai Kontrak	BUA	TP 9
10	Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Sesuai Kontrak	PTUN Jakarta	TP 10
11	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Sesuai Kontrak	PN Jakarta Utara	TP 11
12	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Terpadu di Manado Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	BUA	TP 12
13	Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Ruang Command Center, Assesment Center, dan LPSE Tidak Sesuai Dengan Kontrak	BUA	TP 13